BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Konvensi Basel
Edisi : 26 Juni 2008
Halaman : 13

Kesepakatan Impor-Ekspor Limbah Terancam Buntu

Denpasar, Kompas - Jalan menuju kesepakatan Deklarasi Bali—yang secara khusus menyoroti pentingnya kesehatan dan manajemen limbah dalam strategi pembangunan global— pada Konferensi Para Pihak Kesembilan (COP-9) Konvensi Basel di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, terancam menemui jalan buntu.

Konferensi ini diikuti lebih dari 1.000 delegasi dari 170 negara. Pada pertemuan tingkat menteri kemarin, persoalan yang masih alot dibicarakan adalah mengenai boleh tidaknya melakukan impor-ekspor limbah bahan berbahaya beracun.

Dalam konferensi yang dimulai pada Senin (23/6) itu terjadi tarik ulur antara negara-negara pro dan kontra soal pembuangan limbah tersebut. Negara maju yang selama ini telah mengekspor limbah berkeras keberatan dengan kesepakatan tersebut.

Indonesia sebagai tuan rumah kini bekerja keras mengupayakan hasil maksimal pada akhir konferensi itu. ”Kami tidak ingin mengakhiri dengan hasil deadlock (jalan buntu) seperti 10 tahun lalu di Basel (Swiss). Kami menginginkan adanya hasil maksimal untuk seluruh negara, baik yang pro maupun kontra dalam menolak impor-ekspor limbah,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar sebelum memberikan kuliah umum ”Perubahan Iklim” di Universitas Udayana, Denpasar, kemarin.

Sejak kemarin Indonesia membentuk delapan tim khusus yang bertugas melobi negara-negara yang pro terhadap impor-ekspor limbah, seperti Kanada dan negara maju lainnya. Rachmat memperkirakan, dari 170 negara peserta, 60 di antaranya setuju impor-ekspor limbah.

”Kami perlu kerja keras melobi dan menghindari voting. Kami tetap menargetkan kesepakatan jalan tengah antara negara pro dan kontra. Indonesia sendiri tetap tidak setuju dengan impor-ekspor limbah tersebut karena lebih banyak kerugiannya ketimbang keuntungannya,” ujarnya.

Rachmat sempat menegaskan, negara pengekspor limbah berbahaya harus bertanggung jawab karena negara tersebut cenderung tidak peduli dengan masalah yang ditimbulkan. Sudah muncul kasus di Afrika, limbah semacam itu telah menyebabkan kematian binatang liar, seperti singa dan gajah, juga anak-anak.

Sementara itu, Konvensi Basel merupakan perjanjian internasional yang mengatur lalu lintas internasional limbah berbahaya dan bertujuan meminimalkan peningkatan dan pergerakan limbah melintasi batas antarnegara.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Nasib Bali Roadmap

Pada kesempatan lain, Rachmat menyinggung kurang berlanjutnya Bali Roadmap di negara-negara maju. Ia menilai negara-negara maju tidak memiliki komitmen dan cenderung omong kosong.

”Ternyata mereka hanya bersedia ketika kesepakatan di Bali Desember lalu. Setelahnya, mereka berhenti dan tidak melanjutkan komitmen dalam Bali Roadmap. Hal ini akan kami ajukan kepada Presiden minggu depan,” kata Rachmat.

Beberapa peserta kuliah umum tersebut lebih menyoroti mengapa harus menggunakan nama Bali. Selain itu, mereka mempertanyakan bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap Bali sendiri dan keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia setelah Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim tahun lalu. (AYS)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup